

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING BMN

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-142-OT.02.02 TAHUN 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024	
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,	
			
RAZILU NIP 196511280991031002			
NAMA SOP	MONITORING BMN		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SAKTI BMN; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Penatausahaan Barang Milik Negara.		
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
1. SOP Penyusunan Laporan Penatausahaan BMN	1. Data BMN 2. ATK 3. Komputer/Printer 4. Internet		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :		
Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan program dan kegiatan di BPSDM tidak dapat berjalan dengan baik sesuai standar mekanisme kerja yang berlaku	Disimpan sebagai arsip dan dokumen		

NOMOR SOP	SDM-142-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING BMN DI LINGKUNGAN BPSDM HUKUM DAN HAM

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Ketua Tim	Kepala Bagian Umum	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merencanakan serta menyusun Wilayah/Satker berikut permasalahan pengelolaan BMN untuk dilakukan peninjauan langsung		Mulai			Disposisi	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan pejabat fungsional umum untuk menyiapkan Draft risalah monitoring BMN dan membantu menyiapkan data usulan wilayah/satker yang akan ditinjau					Bahan Monitoring BMN berupa Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang	1 hari	Data Dukung Monitoring BMN Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang	
3	Membuat draft risalah Monitoring BMN dan data wilayah/satker					Bahan Monitoring BMN berupa Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang	1 hari	Draft Laporan Monitoring BMN	
4	Mengkoreksi Draft risalah Monitoring BMN dan data Wilayah/Satker					Draft Laporan Monitoring BMN	1 hari	Draft Laporan Monitoring BMN	
5	Mengkoreksi Draft risalah Monitoring BMN dan data Wilayah/Satker					Draft Laporan Monitoring BMN	1 hari	Draft Laporan Monitoring BMN	
6	Mengesahkan Draft risalah Monitoring BMN dan data Wilayah/Satker					Draft Laporan Monitoring BMN	1 jam	Laporan Monitoring BMN	